

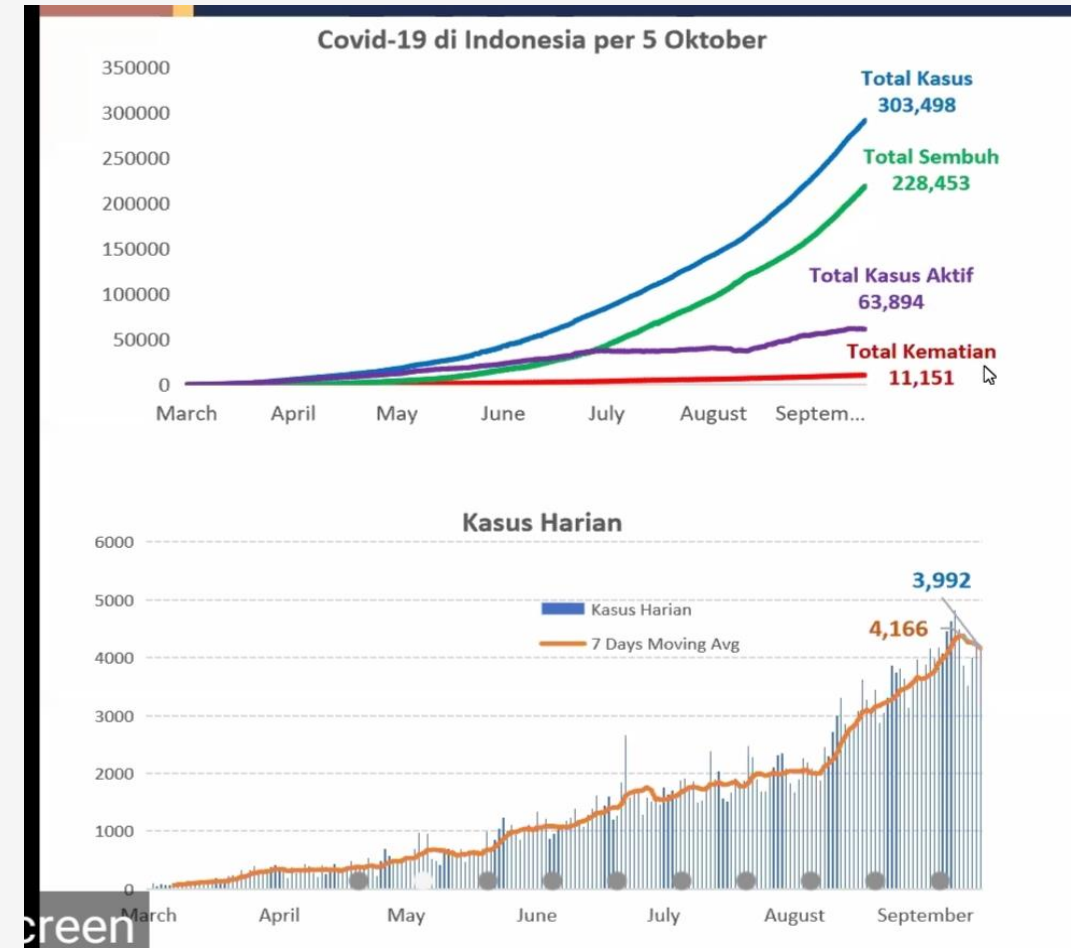
"JANJI PALSU APBN 2021?"

Implementasi & Proyeksi Anggaran Penanganan Covid-19

MISBAH HASAN
Sekjen FITRA

Pendahuluan – Covid-19 semakin merajalela ...

- Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda kurva melandai. Belakangan kasus Covid-19 baru malah menunjukkan angka tertinggi, mencapai 4.634 kasus terkonfirmasi. Secara akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia sebanyak 303.498 kasus, terdiri dari 63.894 (22,92%) kasus aktif, 228.453 (73,22%) kasus sembuh, dan 11.151 (3,86%) kasus meninggal. Rata-rata kasus dalam seminggu terakhir sebanyak 4.166 kasus per hari.
- Peningkatan kasus secara kumulatif per 50.000 kasus juga semakin cepat. Hal tersebut terlihat dari jumlah hari yang dibutuhkan semakin sedikit untuk mencapai kasus kelipatan 50.000 kasus. Pada kasus kumulatif 50.000 pertama membutuhkan waktu selama 115 hari (periode 2 Maret – 25 Juni 2020), pada kasus kumulatif 100.000 kasus dibutuhkan waktu 32 hari (periode 26 Juni – 27 Juli 2020), kemudian pada kasus kumulatif 150.000 kasus dibutuhkan waktu 26 hari (periode 28 Juli – 22 Agustus 2020). Kemudian pada kasus kumulatif 200.000 kasus, dibutuhkan waktu selama 17 hari (periode 23 Agustus – 08 September 2020), dan pada akumulasi kasus 250.000 membutuhkan waktu kurang dari 2 minggu (periode 09 September – 22 September 2020).



Janji Palsu 1 : Penetapan pertumbuhan ekonomi 5%, terkesan ‘pencitraan’?

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN II-2020

Berita Resmi Statistik No. 64/08/Th. XXIII, 5 Agustus 2020

Y-ON-Y **-5,32%** Q-TO-Q **-4,19%** C-TO-C **-1,26%** PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) HARGA BERLAKU **Rp3.687,7 Triliun**

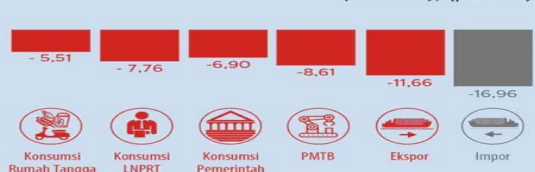
PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) 2018-2020 (Y-ON-Y), (persen)



PERTUMBUHAN PDB MENURUT LAPANGAN USAHA (Y-ON-Y), (persen)



PERTUMBUHAN PDB MENURUT PENGELUARAN (Y-ON-Y), (persen)



PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB MENURUT WILAYAH

Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 58,55 persen dengan pertumbuhan -6,69 persen



BADAN PUSAT STATISTIK
<https://www.bps.go.id>

No.	Asumsi Makro	RAPBN	APBN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 – 5,5	5,0
2	Laju Inflasi (%)	3,0	3,0
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.600	14.600
4	Tingkat Suku Bunga SBN-10 Tahun (%)	7,29	7,29
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	45	45
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	705	705
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.007	1.007

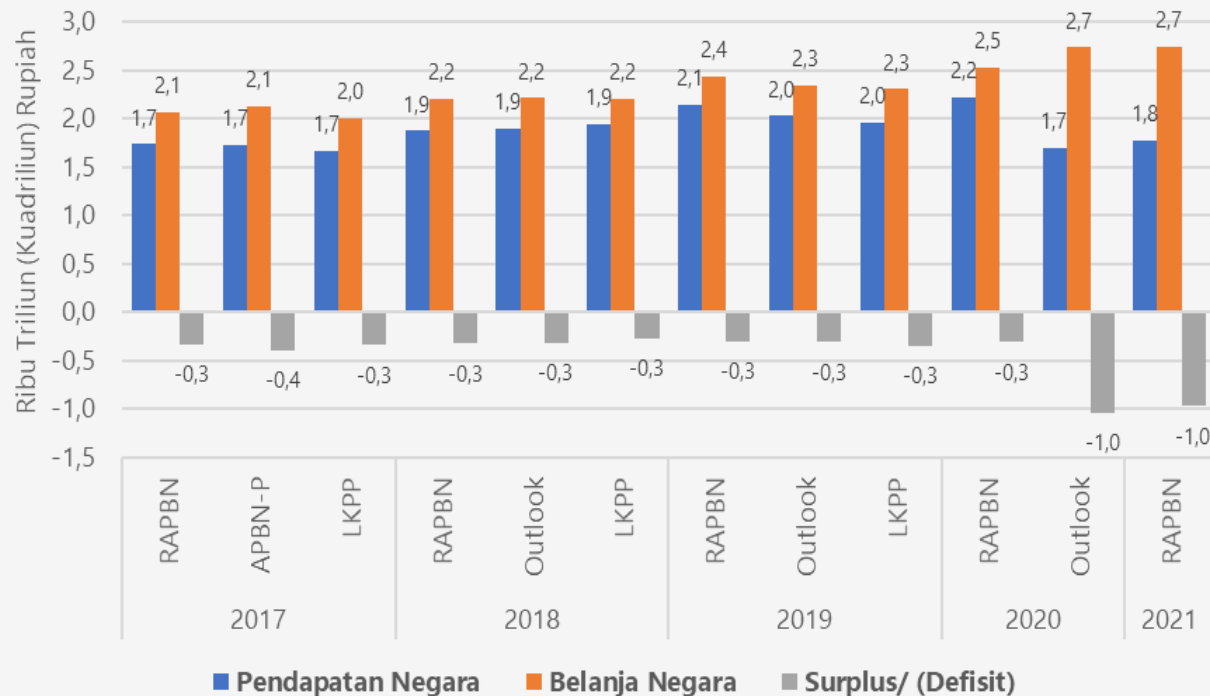
Penetapan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 5% di tengah resesi ekonomi termasuk over ambisius, mengingat pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua dan ketiga 2020 mengalami kontraksi cukup dalam -5,32 dan -3 persen.

Postur APBN 2020 & 2021

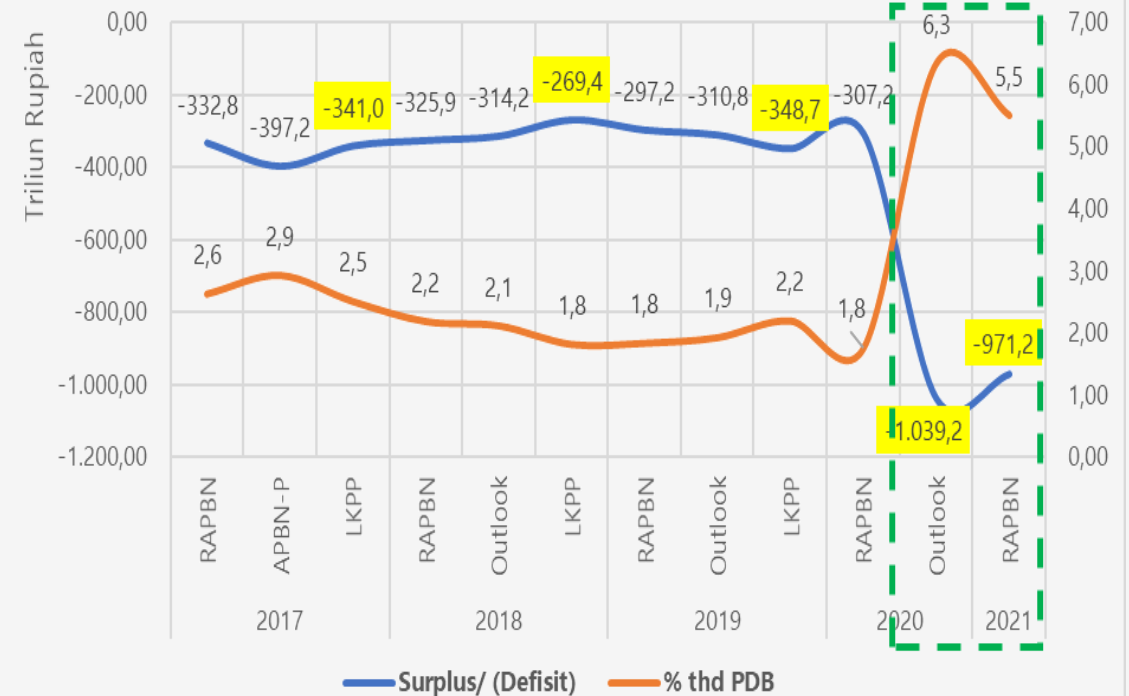
URAIAN	2020	2021
	Perpres 72 Tahun 2020	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.699,9	1.743,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.698,6	1.742,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,5	1.444,5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,1	298,2
II. PENERIMAAN HIBAH	1,3	0,9
B. BELANJA NEGARA	2.739,2	2.750,0
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.975,2	1.954,5
1. Belanja K\L	836,4	1.032,0
2. Belanja Non K\L	1.138,9	922,6
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	763,9	795,5
1. Transfer ke Daerah	692,7	723,5
2. Dana Desa	71,2	72,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(700,4)	(633,1)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(1.039,2)	(1.006,4)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(6,34)	(5,70)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.039,2	1.006,4

Janji Palsu 2 : Optimalisasi Pendapatan dan Efisiensi Belanja, sekedar Retorika?

Ringkasan APBN 2017-2020 dan RAPBN 2021



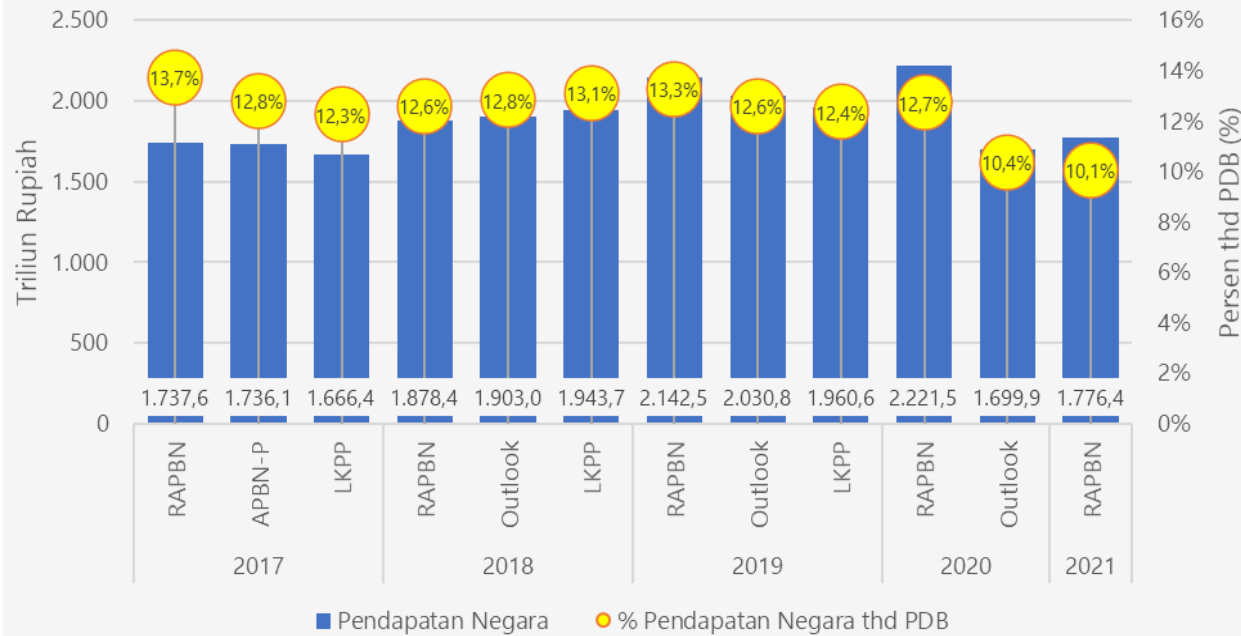
Defisit APBN 2017-2021



RAPBN selalu direncanakan defisit, bahkan lebih lebar di masa darurat Pandemi Covid-19. Pada RAPBN 2021, Defisit Anggaran diproyeksikan Rp971,2 T (5,50% thp PDB) dan ditetapkan menjadi Rp1.006,4 T (5,70% thp PDB) di APBN 2021. Ini tidak lepas dari proyeksi pendapatan di APBN 2021 yang dipatok Rp1743,6 T dan Belanja Negara Rp2.750,0 T. **Janji optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja belum tercermin pada skema ini.**

Janji Palsu 3 : Realiasi penerimaan Perpajakan, selalu di bawah target ...

Tren Pendapatan Negara, 2017-2020 dan RAPBN 2021



Tren Perpajakan dan Proporsinya, 2016-2021



Pada 2020 dan 2021, pemerintah mematok target rasio Penerimaan Perpajakan terhadap Pendapatan Negara sebesar 82,6% dan 82,8% (Rp1.444,5 T – APBN 2021) dari Total Pendapatan Negara, lebih tinggi dari rata-rata realisasi Penerimaan Perpajakan di masa sebelum pandemi Covid-19 (2016-2019), yaitu 80%. Faktanya, target Penerimaan Perpajakan belum pernah tercapai. Berdasarkan data per 31 Agustus 2020, proporsi penerimaan perpajakan baru mencapai 46,9% dari Pendapatan Negara. Artinya, rata-rata penerimaan pajak sejak awal Januari – Agustus 2020 adalah sebesar 6,7% per bulan. Berdasarkan data rata-rata tersebut, maka realisasi Penerimaan Perpajakan sampai akhir 2020 diperkirakan hanya sebesar 73,7-77,1% dari Pendapatan Negara.

Janji Palsu 4: penerima insentif usaha, sering tidak tepat sasaran ...

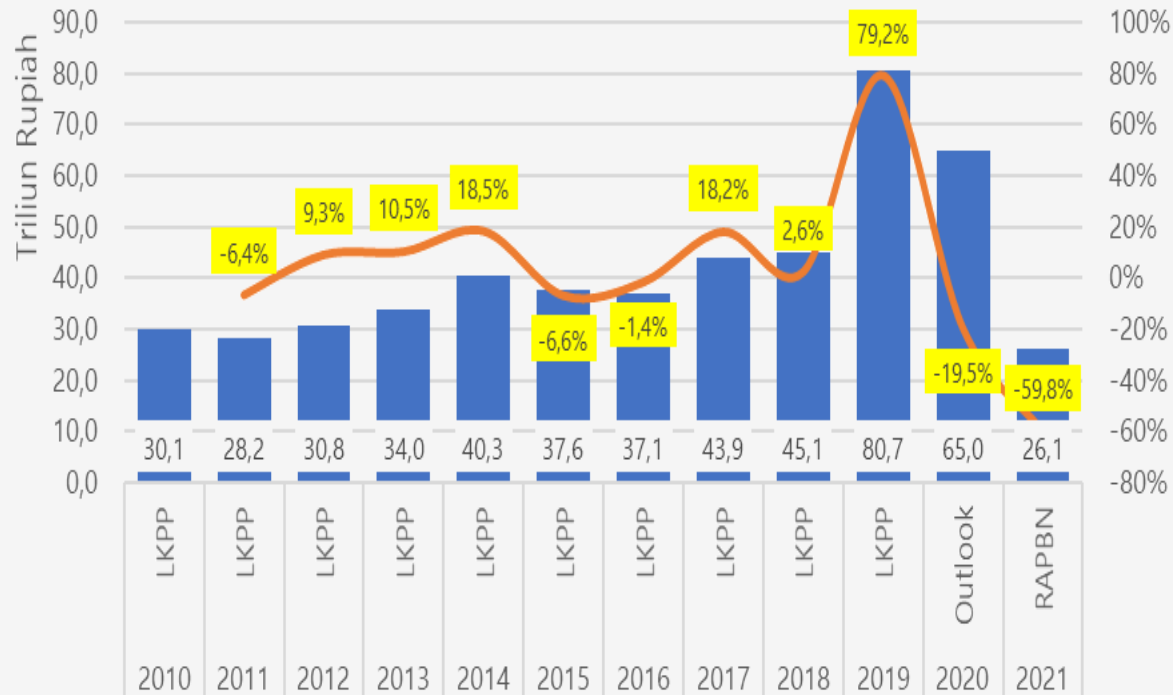
- Insentif pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk tetap menjaga sisi *supply* agar aktivitas dunia usaha tidak berhenti akibat Covid-19. Selain itu, insentif pajak juga diberikan untuk mengendalikan tingkat PHK.
- Pada tahun 2020, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp120,61 triliun untuk insentif usaha dan direncanakan menurun Rp100 triliun pada TA 2021 menjadi Rp20,40 triliun.
- Namun patut menjadi perhatian adalah bahwa pemberian insentif ini berkonsekwensi pada penurunan pendapatan negara. Sejumlah literatur akademik juga menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak tidak selalu berdampak positif terhadap peningkatan PDB, penciptaan lapangan kerja, pendapatan per kapita, penurunan tingkat kemiskinan, dan penciptaan dunia usaha (Prillaman and Kenneth, 2014).
- Oleh karena itu, insentif pajak di 2021 harus tepat sasaran diberikan bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19.

BIAYA PENANGANAN COVID-19 (Rp 695,2 T)



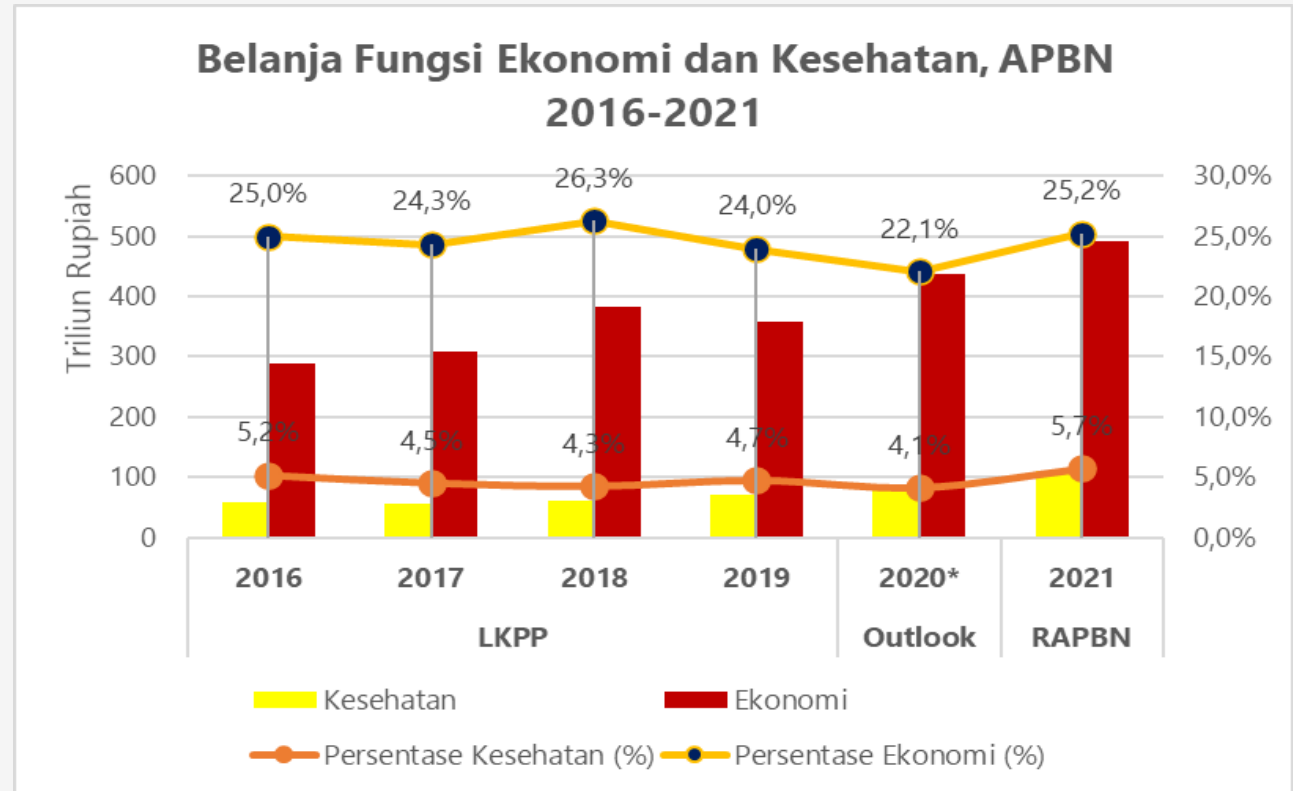
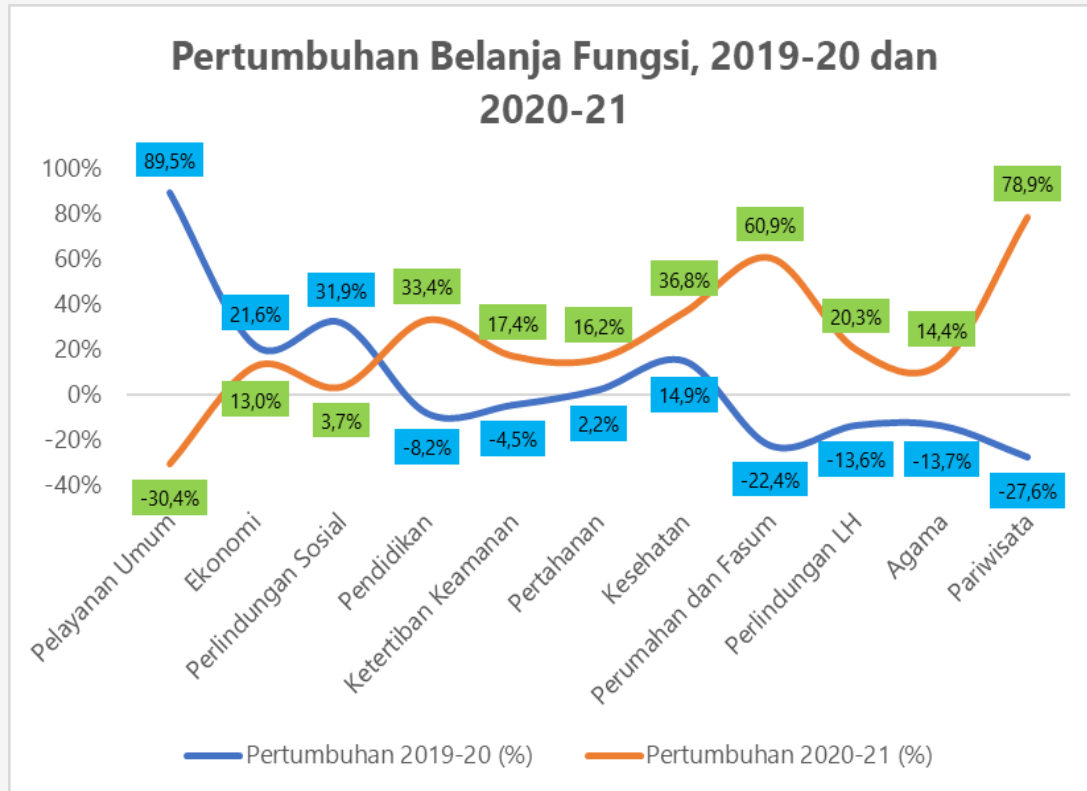
Janji Palsu 5: BUMN berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Negara ..

Tren Bagian Laba BUMN dan Pertumbuhannya,
2010-2021



- **Target kontribusi BUMN terhadap APBN patut disoal.** Pasalnya, seluruh komponen sumber Penerimaan Dalam Negeri ditargetkan meningkat di 2021, kecuali Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) atau bagian dari laba BUMN. Proyeksi Pengurangan Bagian Laba BUMN ini menjadi yang paling rendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
 - Padahal salah satu strategi yang disebutkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2021 dalam mengoptimalkan PNBPN pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh negara, salah satunya adalah BUMN.
 - Situasi ini mengisyaratkan pemerintah tidak konsisten antara optimisme perbaikan ekonomi di 2021 dg target Pendapatan dari KND. Menjadi lebih aneh lagi karena Menteri BUMN adalah Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- **Harusnya, Menteri BUMN dapat menggenjot kinerja BUMN agar dapat berkontribusi lebih besar untuk APBN di masa sulit ini.** Karena APBN adalah instrument utama penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional 2021.

Janji Palsu 6: Kesehatan menjadi Prioritas di tengah pandemi, benarkah? ...



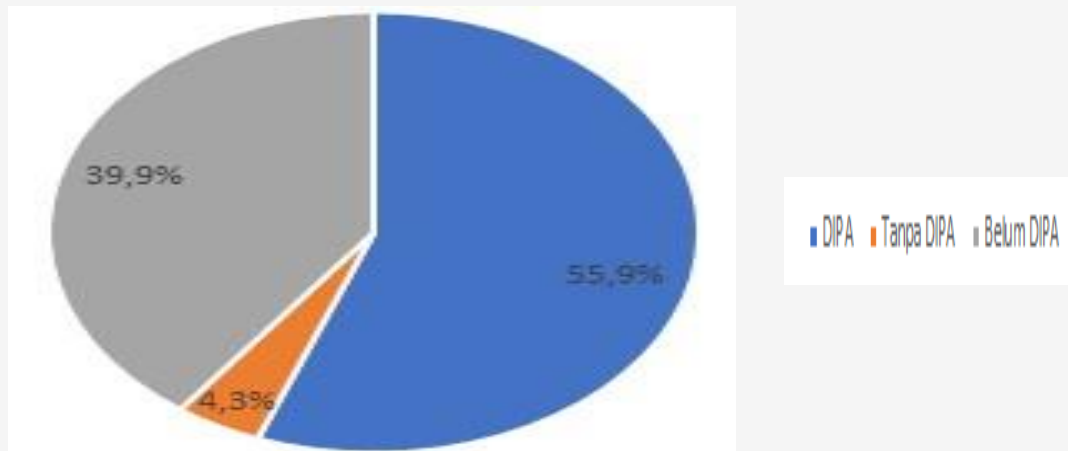
- RAPBN 2021 masih berorientasi pada ekonomi ketimbang kesehatan, hal tersebut terlihat dari tingginya Belanja Fungsi Ekonomi dibanding Belanja Fungsi Kesehatan. Bandingannya 4 : 1.
- Rata-rata belanja fungsi Kesehatan (2016-2019) hanya 4,7% dari belanja pemerintah pusat. Sementara belanja fungsi ekonomi mencapai 24,5% dari belanja pemerintah pusat dengan rata-rata per tahun sebesar Rp377,7 T. Pada Outlook APBN 2020, meskipun secara proporsi menurun 2%, tetapi nominal meningkat sebesar Rp77,5 T.

Rendahnya anggaran riset bidang kesehatan ...

- **Anggaran kesehatan dominan untuk pelayanan, masih sangat minim untuk riset.** Dalam RAPBN 2021, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169.708,5 miliar atau 6,2 persen terhadap belanja negara. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan dan health security preparedness sebagaimana kerangka kebijakan reformasi sistem kesehatan.
- Namun demikian, anggaran untuk kegiatan riset dan pengembangan kesehatan masih sangat minim. Hal tersebut terlihat pada rencana alokasi anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes yang hanya sebesar Rp 818,7 juta rupiah atau satu persen dari Belanja Kemenkes. Sebagian besar dari anggaran belanja tersebut digunakan untuk program dukungan manajemen, yaitu Rp 625,4 juta, sedangkan untuk Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hanya sebesar Rp 193,3 juta.
- Di tengah situasi pandemi saat ini, anggaran riset kesehatan sepatutnya untuk ditingkatkan untuk menemukan inovasi dan temuan baru untuk mendukung penanganan covid- 19.

Rendahnya serapan anggaran kesehatan dalam penanganan Covid-19 ...

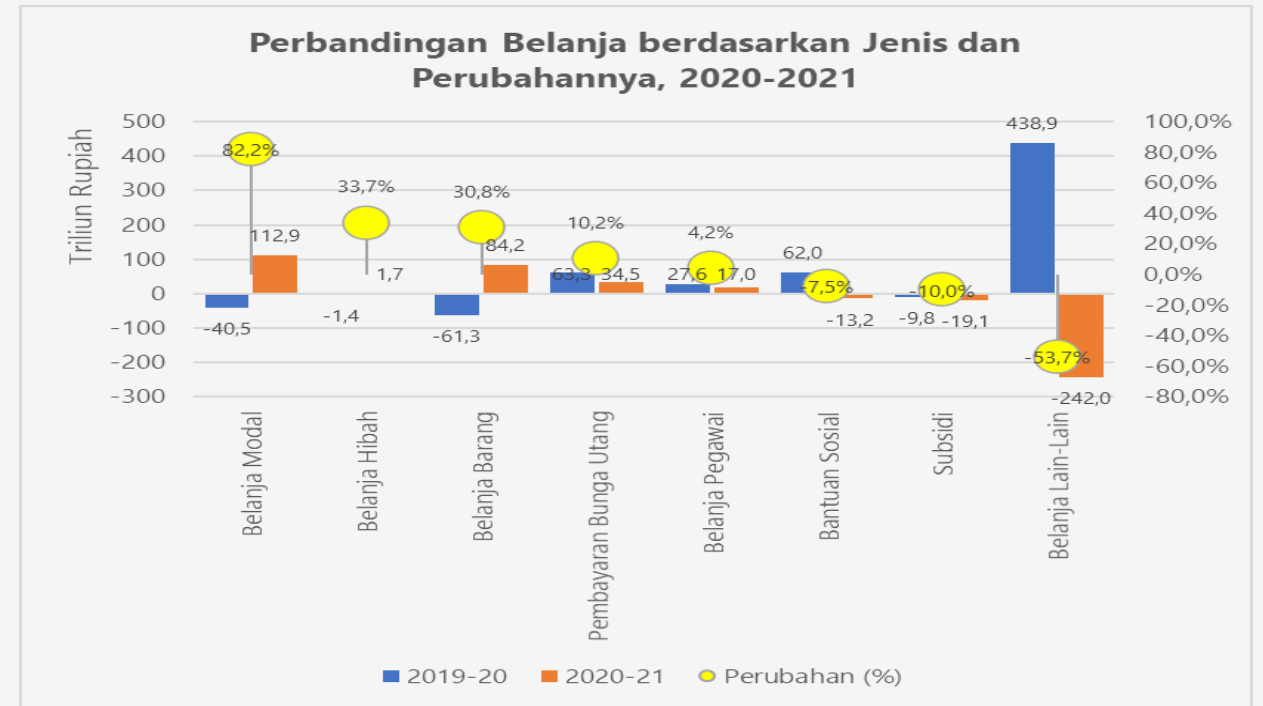
Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
Penanganan COVID-19	65,80		0,0%
Insentif Pajak bid. Kesehatan	9,05	2,26	25,0%
Insentif Tenaga Medis	5,90	1,86	31,5%
Gugus Tugas COVID-19	3,50	3,22	92,0%
Bantuan Iuran JKN	3,00		0,0%
Santunan Kematian Nakes	0,30	0,02	7,2%
Jumlah	87,55	7,36	8,4%



- **Jangan terulang! Pengelolaan anggaran kesehatan Covid-19 pada RAPBN 2021 harus lebih dioptimalkan.** Serapan anggaran Kesehatan Covid-19 pada 2020 masih sangat rendah. Berdasarkan data capaian realisasi anggaran kesehatan per 27 Agustus 2020 realisasi anggaran kesehatan baru mencapai Rp7,36 triliun atau 8,41% pagu anggarannya;
- Sementara itu, masih ada Rp34,9 triliun anggaran kesehatan penanganan Covid-19 belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), artinya bahwa 40% sumber daya anggaran yang dijanjikan untuk penanganan Kesehatan terutama Covid-19 belum memiliki rencana program dan kegiatannya. Hal ini adalah praktik buruk pengelolaan anggaran di 2020 yang tidak boleh terulang di 2021

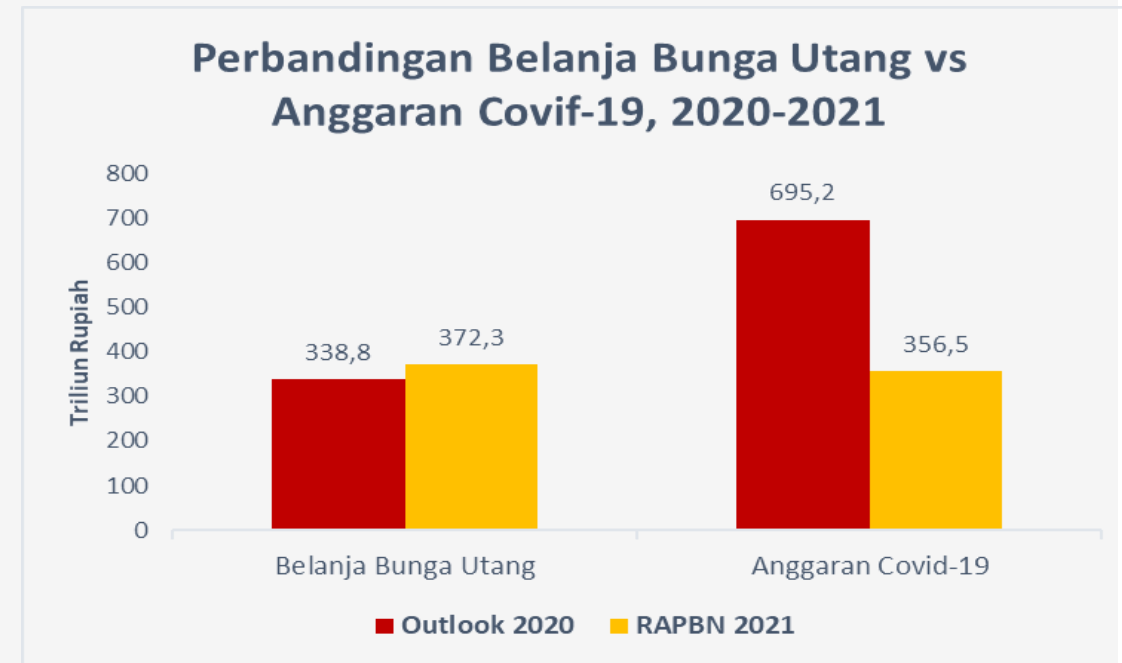
Janji Palsu 7: Belanja Infrastruktur tinggi, tapi bukan untuk fasilitas kesehatan

- **Belanja modal tumbuh tertinggi, namun tidak untuk fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan.**
- Dalam RAPBN 2021, Belanja Modal mengalami kenaikan paling signifikan dibanding jenis belanja lainnya. Belanja Modal tumbuh 82% atau meningkat Rp 112,9 triliun dari Rp 137,4 di 2020 menjadi Rp 250,3 triliun di 2021. Pertumbuhan Belanja modal tersebut jauh lebih tinggi dibanding rata-rata realisasinya selama 2016-2019 sebesar 9%. Pertumbuhan jenis belanja tertinggi kedua dan ketiga terjadi di pos Belanja Hibah dan Belanja Barang-Jasa yang mengalami kenaikan sebesar 34% dan 31%.
- Belanja Modal tidak untuk program peningkatan kualitas fasilitas dan sarana kesehatan. Melainkan untuk mendukung agenda digitalisasi serta pembangunan infrastruktur perekonomian di kawasan perbatasan, tertinggal, wilayah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan).



Janji Palsu 8: Utang Negara masih aman, tapi semakin membebani APBN ...

- Waspada *Oustanding* utang yang mayoritas adalah SBN, ketahanan keuangan negara sangat rentan (*vulnerable*). Pemerintah telah memposisikan pembiayaan utang sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Hal ini nampak jelas dari pembiayaan utang yang meroket tajam dari Rp402,1 triliun di 2019 menjadi Rp1.225,5 triliun di 2020 dan 2021 rencana pembiayaan utang sebesar Rp1.142,5 triliun.



- Hingga Juli 2020, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp5.434,86 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 33,63%. Persoalannya adalah hampir seluruh utang tersebut merupakan SBN yang dapat diperjualbelikan (*tradeable*), dan sebagian besar dikuasi investor asing hingga mencapai 30% (Per Juni 2020). Di 2021, pembiayaan utang dari SBN direncanakan Rp1.172,4 triliun.

Janji Palsu 9: Anggaran Covi-19, belum responsive gender ...

- Dampak ekonomi dan sosial Covid-19 menyebabkan kepala keluarga (laki-laki) kehilangan pekerjaan, dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terlalu lama, menyebabkan pelampiasan kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Dalam catatan LBH APIK pada masa sebelum PSBB, setiap bulan terjadi pengaduan kasus kekerasan rata-rata 60 laporan kasus, selama 16 Maret – 19 April 2020 laporan kasus kekerasan meningkat menjadi 97 laporan kasus atau meningkat 61,7%. Dari laporan kasus tersebut, yang paling tinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 33 (35,1%) laporan dan kekerasan gender berbasis online sebanyak 30 laporan kasus (30,9%). Pada masa pandemi saat ini juga perempuan menjadi kelompok paling rentan, meskipun angka kasus Covid-19 di Indonesia secara proporsi lebih tinggi laki-laki dibanding perempuan;
- Kebijakan insentif bagi tenaga medis diberikan kepada dokter spesialis sebesar Rp15 juta/bulan, dokter umum sebesar Rp10 juta/bulan, perawat sebesar Rp7,5 juta/bulan dan tenaga Kesehatan lainnya sebesar Rp5 juta/bulan. Menurut Arivia (2020) kebijakan tersebut menunjukkan adanya diskriminasi terhadap mereka yang bekerja sebagai *careworkers* dan profesi perawat tidak dinilai penting dibandingkan dokter.
- Selain itu, kebijakan pemerintah untuk penanganan Covid-19 belum memperhatikan kebutuhan bagi kelompok rentan dan marginal lainnya. Misalnya bagi kelompok kunci (ODHA) yang membutuhkan ARV pada masa pandemi, kebutuhan bagi kelompok difabel, dan kelompok rentan lainnya

Rekomendasi

1. Rasionalisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2021 – kami yakin APBN 2021 akan diubah sebagaimana APBN 2020;
2. Optimalisasi penerimaan negara melalui intensifikasi pajak dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (BUMN);
3. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberian insentif usaha, baik berupa keringanan pajak, dll agar lebih tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan (conflict of interest);
4. Kembali focus pada besaran dan efektifitas penggunaan anggaran kesehatan, terutama untuk kebutuhan riset penanganan Covid-19;
5. Memfokuskan Belanja Modal untuk program peningkatan kualitas fasilitas dan sarana kesehatan, terutama di masa pandemi Covid-19;
6. Mengurangi ketergantungan Utang Negara, dengan melakukan efisiensi Belanja K/L.
7. Perlu mendorong Anggaran Penanganan Covid-19 lebih responsive gender dan inklusif.